



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN**

**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
TAHUN 2021**



**Jl. Veteran III No.2
Jakarta 10110**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Setwantimpres Tahun 2021

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan sejalan dengan agenda reformasi birokrasi serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden kepada publik atas program, kegiatan dan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara berkesinambungan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden ini mengacu kepada tugas yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021.

Mudah-mudahan penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 2021 ini dapat menjadi media evaluasi kinerja selama satu tahun, sehingga dapat meningkatkan kinerja di tahun yang akan datang.

Jakarta, 15 Februari 2022

Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden,



Agus Widodo

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Setwantimpres Tahun 2021

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan sejalan dengan agenda reformasi birokrasi serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden kepada publik atas program, kegiatan dan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara berkesinambungan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden ini mengacu kepada tugas yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021.

Mudah-mudahan penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 2021 ini dapat menjadi media evaluasi kinerja selama satu tahun, sehingga dapat meningkatkan kinerja di tahun yang akan datang.

Jakarta, Februari 2022
Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden,

Agus Widodo

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
Daftar Lampiran	vii
BAB I Pendahuluan	1
A Latar Belakang	1
B Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	1
C Struktur Organisasi	3
1 Biro Data dan Informasi	5
2 Biro Umum	5
D Sumber Daya Manusia	6
E Aspek Strategis	7
F Sistematika Penyajian Laporan	10
BAB II Perencanaan Kinerja	
A Rencana Strategis Tahun 2020-2024	12
1 Visi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden	12
2 Misi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden	13
3 Tujuan Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden	13
4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	14
B Perjanjian Kinerja Tahun 2021	15

BAB III	Akuntabilitas Kinerja	
A	Capaian Kinerja Tujuan	20
B	Capaian Kinerja Sasaran	21
1	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja	22
2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis	24
C	Analisis Capaian Kinerja	24
1	Capaian Kinerja <i>Output</i>	24
2	Analisis Capaian Kinerja <i>Outcome</i>	46
3	Faktor Pendukung Keberhasilan	49
4	Permasalahan/Kendala dan Solusi	50
D	Perbandingan Capaian Kinerja <i>Outcome</i>	57
1	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja <i>Outcome</i> dengan Target Tahun 2021	57
2	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja <i>Outcome</i> Tahun 2020 dan Tahun 2021	58
3	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja <i>Outcome</i> Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah	58
E	Akuntabilitas Keuangan	61
1	Pagu Alokasi Anggaran dan Penyerapan Anggaran	61
2	Analisis Penyerapan Anggaran Selama Tahun 2021	66
F	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	67
1	Efisiensi Sumber Daya Manusia	67
2	Efisiensi Anggaran	67
3	Sarana Prasarana	67
G	Pemanfaatan Informasi Kinerja	68
H	Informasi Kinerja Lainnya	69
I	Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun Sebelumnya	71

BAB IV	Penutup	
	A Kesimpulan	65
	B Langkah ke Depan	66

DAFTAR TABEL

Laporan Kinerja Setwantimpres Tahun 2021

	Halaman
Tabel 1	Komposisi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 7
Tabel 2	Sasaran Kegiatan (output) dalam Perjanjian Kinerja di tingkat Eselon II Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2021 17
Tabel 3	Capaian Tujuan Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan presiden Tahun 2020 dan 2021 19
Tabel 4	Capaian Tujuan Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan presiden Tahun 2021 20
Tabel 5	Penilaian Tingkat Kepuasan Dewan Pertimbangan presiden 21
Tabel 6	Formulasi Penghitungan Indikator Kinerja 22
Tabel 7	Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2021 23
Tabel 8	Jenis Layanan dan Pernyataan Kualitas Layanan Penilaian Tingkat Kepuasan 45
Tabel 9	Tingkat Kepuasan Layanan Tahun 2021 48
Tabel 10	Permasalahan/Kendala dan Solusi pada Tahun 2021 50
Tabel 11	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021 58
Tabel 12	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020 dan Tahun 2021 59
Tabel 13	Perbandingan Realisasi Kinerja <i>Outcome</i> Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah 60
Tabel 14	Alokasi Anggaran Setelah Revisi Berdasarkan Jenis Belanja TA 2021 61
Tabel 15	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2021 62
Tabel 16	Perbandingan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2020 dan Tahun 2021 63

Tabel 17	Pagu Alokasi dan Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja pada Kegiatan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2021	63
Tabel 18	Tindak Lanjut atas Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020-2021	68
Tabel 19	Tindak Lanjut atas Rekomendasi Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020	73

DAFTAR GAMBAR

Laporan Kinerja Setwantimpres Tahun 2021

	Halaman
Gambar I.1. Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden	4
Gambar I.2. Komposisi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Setwantimpres	7
Gambar II.1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2021	15
Gambar III.1. Diagram Pembagian Anggaran Berdasarkan Biro	34
Gambar III.2. Diagram Tingkat Kepuasan Layanan Tahun 2021	49

DAFTAR LAMPIRAN

Laporan Kinerja Setwantimpres Tahun 2021

- 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- 2 Formulir Pengukuran Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2021

BAB I

Pendahuluan

Laporan Kinerja Setwantimpres Tahun 2021

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2021 merupakan wujud transparansi pertanggungjawaban kinerja kepada publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2021. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2021.

Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2007, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden merupakan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan Presiden dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara.

Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2007. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden ditetapkan pada tanggal 16 November 2020, dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan atau tanggal 23 November 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden kedudukan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan Presiden dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara dengan tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menyelenggarakan fungsi sebagai berikut,

1. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana program dan anggaran, serta akuntabilitas kinerja di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
2. pengelolaan dan penyajian data dan informasi kebijakan yang diperlukan Dewan Pertimbangan Presiden;
3. pemberian dukungan pelaksanaan sidang, rapat, pertemuan yang diselenggarakan Dewan Pertimbangan Presiden;
4. koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan lembaga negara dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden;
5. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, arsip, dokumentasi, dan kerumahtanggaan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;

7. pelayanan persidangan, keprotokolan, teknologi informasi dan komunikasi, serta hubungan masyarakat di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
8. pemberian dukungan penyiapan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden kepada Presiden; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan Presiden.

C. Struktur Organisasi

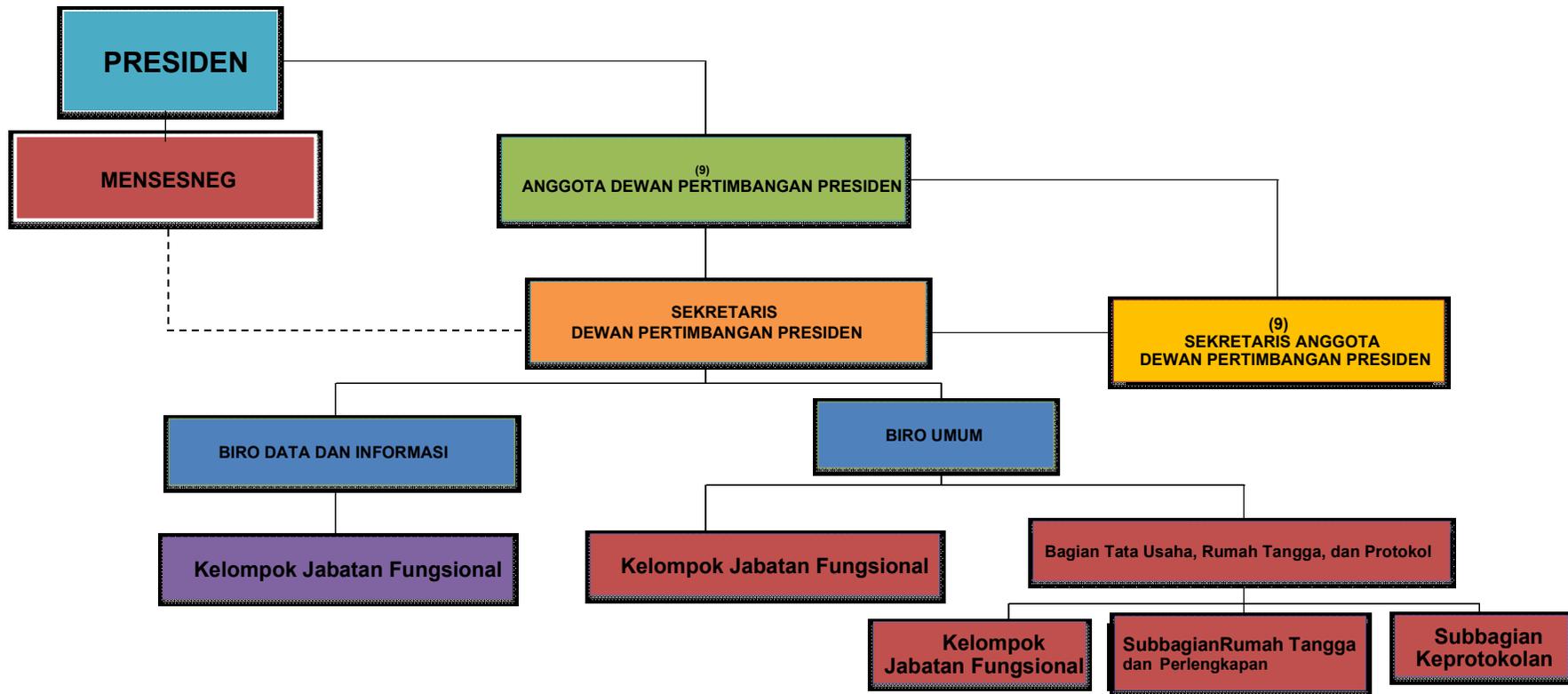
Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden terdiri atas 2 (dua) unit kerja, yaitu Biro Data dan Informasi dan Biro Umum. Biro Data dan Informasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional sedangkan Biro Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Bagian Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Protokol terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan dan Subbagian Protokol.

Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui proses *delayering* jabatan fungsional dari jabatan struktural pertama kali dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2020.

Selama tahun 2021 ada sebanyak 7 (tujuh) pegawai Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah dilantik sebagai pejabat fungsional.

Gambaran Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud, dapat dilihat sebagai berikut.

Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden



Gambar I.1. Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Tugas dan Fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden:

1. Biro Data dan Informasi

Biro Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyajian data dan informasi mengenai kebijakan yang akan, sedang, atau telah dilaksanakan pemerintah, serta permasalahan aktual di bidang substansi kebijakan yang diperlukan Wantimpres serta kehumasan dan pengelolaan informasi publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, dokumentasi data dan informasi mengenai kebijakan yang akan, sedang atau telah dilaksanakan pemerintah, serta permasalahan aktual di bidang substansi kebijakan yang diperlukan Wantimpres;
2. Penyiapan bahan/materi, rapat, pertemuan yang diselenggarakan Wantimpres;
3. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan lembaga negara dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang diperlukan oleh Wantimpres;
4. Pelaksanaan dokumentasi sidang, rapat, pertemuan yang diselenggarakan Wantimpres;
5. Penyiapan laporan pelaksanaan tugas Wantimpres kepada Presiden;
6. Pelayanan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
7. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
8. Pelaksanaan dukungan administrasi Biro.

2. Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana program dan anggaran dan akuntabilitas kinerja, pengelolaan urusan keuangan, ketatausahaan, arsip dan dokumentasi, administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pelayanan kerumahtanggaan, serta keprotokolan dan persidangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut,

1. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
2. penyusunan Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, pengukuran kinerja, pemantauan, dan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden;
3. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
4. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden;
5. pelaksanaan urusan ketatausahaan, arsip dan dokumentasi, administrasi kepegawaian, dan administrasi umum lainnya di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
6. pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
7. pelayanan kerumahtanggaan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
8. pelayanan keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden; dan
9. pelaksanaan dukungan administrasi Biro.

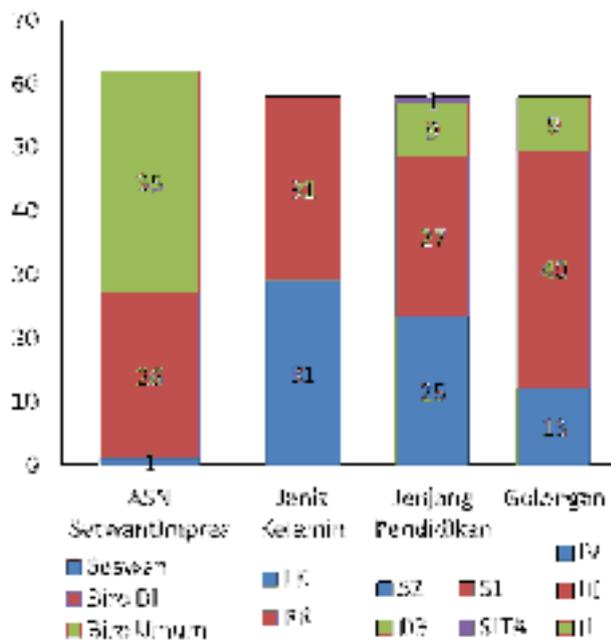
D. Sumber Daya Manusia

Kekuatan Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden per 31 Desember 2021 berjumlah 62 (enam puluh dua) orang. Komposisi SDM Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berdasarkan unit kerja, jenis kelamin, golongan dan jenjang pendidikan di gambarkan pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 1
Komposisi Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

ASN Setwantimpres			Jenis Kelamin		Jenjang Pendidikan				Golongan		
Seswan	Biro DI	Biro Umum	LK	PR	S2	S1	D3	SLTA	IV	III	II
1	26	35	31	31	25	27	9	1	13	40	9



Gambar 1.2 Komposisi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Setwantimpres

E. Aspek Strategis

Kedudukan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan Presiden mempunyai posisi strategis dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden dalam menjalankan tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Permasalahan yang dihadapi dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden dalam menjalankan tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden selama tahun 2021 antara lain.

1. Adanya perubahan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menuntut Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden untuk cepat beradaptasi dengan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru antara lain,
 - a. Perubahan SOTK mempengaruhi peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, salah satunya terkait pekerjaan urusan Tata Usaha Perjalanan Dinas yang semula ada pada Subbagian Keprotokolan Biro Umum, namun pada saat ini tidak tercantum dalam SOTK yang baru serta adanya penguatan tugas dan fungsi di bidang Kehumasan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Biro Data dan Informasi.
 - b. Permasalahan terjadi setelah penyetaraan jabatan dari Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, salah satunya adalah terkait pengembangan kompetensi. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun disebutkan dalam ketentuan pasal 22 Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, bahwa setelah diangkat dan dilantik maka pejabat fungsional hasil penyetaraan wajib mengikuti dan memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan serta memiliki sertifikat sesuai yang disyaratkan.
 - c. Kebutuhan penyesuaian aturan-aturan teknis terkait SOTK untuk mengoptimalkan pencapaian target organisasi.
2. Pandemi COVID-19 yang masih melanda sepanjang tahun 2021 berdampak pada pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden antara lain,

- a. Perubahan pola kerja, tantangan logistik, dan penghematan anggaran serta relokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan penyediaan perlengkapan dan peralatan pencegahan penyebaran COVID-19, pelaksanaan pemeriksaan *Swab Reverse Transcription* Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dan penyediaan multivitamin penambah daya tubuh bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.
 - b. Kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang dinamis, mengikuti jadwal kegiatan masing-masing Anggota Dewan Pertimbangan Presiden serta kondisi selama Pandemi COVID-19.
3. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai menjadi kendala dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam memberikan dukungan yang efektif kepada Dewan Pertimbangan Presiden. Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai ini disebabkan,
- a. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden serta kondisi sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan atau penurunan fungsi;
 - b. Kebutuhan penyesuaian *layout* ruang kerja sebagai dampak restrukturisasi organisasi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas pekerjaan para pejabat/pegawai kantor Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.
4. Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki. Jumlah Sumber Daya Manusia yang masih kurang memadai tetap menjadi isu penting selama tahun 2021. Formasi kebutuhan pegawai Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden belum terpenuhi seluruhnya, hal ini menyebabkan tingginya beban kerja pegawai sehingga menjadi kendala tersendiri dalam memberikan dukungan yang efektif kepada Dewan Pertimbangan Presiden.
5. Keterbatasan SDM yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan teknis di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi serta bidang Kehumasan, untuk mengatasi permasalahan keamanan aplikasi, jaringan, dan *website*.

F. Sistematika Penyajian Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum mengenai Latar belakang, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Aspek Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2021, yang meliputi Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020 - 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menjelaskan informasi tentang Capaian Kinerja Tujuan, Capaian Kinerja Sasaran, Analisis Capaian Indikator Kinerja, Perbandingan Capaian Indikator Kinerja, Akuntabilitas Keuangan, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Pemanfaatan Informasi Kinerja, Kinerja Lainnya, serta Tindak lanjut Rekomendasi Tahun Sebelumnya.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan menyeluruh atas capaian kinerja serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

BAB II

Perencanaan Kinerja

Laporan Kinerja Setwantimpres Tahun 2021

A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020—2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi para pejabat dan pegawai di Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada periode 2020-2024.

Selama tahun 2021, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah melaksanakan penyempurnaan Renstra melalui Revisi Kesatu Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020—2024, yang merupakan penyesuaian terhadap Permensesneg Nomor 7 tahun 2020. Revisi kesatu Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020—2024 ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021.

1. Visi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Dalam mendukung Visi Presiden sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menetapkan visi sebagai berikut.

VISI

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan kepada Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam mewujudkan Indonesia Maju dan Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

Visi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi serta lingkungan strategis. Visi tersebut diarahkan untuk membawa Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menjadi suatu organisasi yang andal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan dan akuntabel serta dengan kualitas pelaksanaan yang prima, berintegritas, efektif dan efisien.

2. Misi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, ditetapkan misi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagai berikut.

MISI

- 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan penyajian informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden;**
- 2. Memberikan dukungan pelayanan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden secara prima.**

3. Tujuan Strategis dan Indikator Tujuan Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden perlu merumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan yang lebih operasional.

Tujuan dan Indikator Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s.d. 5 tahun mendatang, agar diketahui apa yang harus dilaksanakan organisasi dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki. Dengan menggunakan potensi yang dimiliki untuk memanfaatkan kekuatan yang ada, memanfaatkan potensi untuk mengatasi ancaman/tantangan,

mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang untuk menuju terwujudnya visi dan misi organisasi, maka ditetapkan tujuan strategis dan indikator tujuan strategis sebagai untuk mengukur tujuan strategis tersebut. Tujuan strategis dan indikator tujuan strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sebagai berikut.

TUJUAN STRATEGIS

Tercapainya tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

INDIKATOR TUJUAN STRATEGIS

Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

4. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis

Sebagai salah satu Lembaga yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden melaksanakan salah satu sasaran strategis yang tertera pada Renstra Kementerian Sekretariat Negara. Sasaran Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden merupakan sarana untuk mencapai Tujuan Strategis dengan indikator keberhasilannya sebagai berikut,

SASARAN STRATEGIS

Pelaksanaan tugas khusus yang optimal

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

Persentase dukungan tugas khusus dan administrasi pada lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Tujuan disusunnya dokumen perjanjian kinerja adalah:

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja aparatur; dan
5. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun

2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja yang telah disusun pada Tahun 2021 yang meliputi sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja disajikan pada gambar berikut.



Gambar II.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2021

Kerangka kinerja kegiatan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden terdiri dari 2 kegiatan, yaitu,

1. Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi dalam rangka penyusunan Nasihat dan Pertimbangan kepada Presiden
2. Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden

Masing-masing kegiatan terdiri sasaran kegiatan (*output*), indikator sasaran kegiatan, dan target Kegiatan.

Uraian sasaran kegiatan (*output*) yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja di tingkat Eselon II Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2
Sasaran Kegiatan (*output*) dalam Perjanjian Kinerja di tingkat Eselon II Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden dalam melaksanakan tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	1	Persentase penyelesaian layanan perumusan nasihat dan pertimbangan Dewan Pertimbangan Presiden	100%
		2	Persentase penyediaan data dan informasi serta analisis yang dibutuhkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden	100%
		3	Jumlah rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu.	2 Dokumen
		4	Persentase pelaksanaan layanan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden	100%
		5	Persentase pelaksanaan pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang dibutuhkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan Sinergitas TIK di Lingkungan Lembaga Kepresidenan	100%

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
		6	Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan tahunan Biro Data dan Informasi yang disusun	2 Dokumen
2	Terwujudnya dukungan pelayanan keprotokolan dan persidangan serta pelayanan administrasi umum di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden	1	Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan	100%
		2	Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan Persidangan	100%
		3	Jumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan	2 Dokumen
		4	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan	10 Dokumen
		5	Jumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan sesuai standar	1 Dokumen
		6	Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan	9 Dokumen
		7	Jumlah dokumen administrasi sarana dan prasarana sesuai ketentuan	2 Dokumen
		8	Persentase penyediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan	100%
		9	Persentase penerapan <i>e-procurement</i> dalam pengadaan barang dan jasa	100%

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
		10	Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan tahunan Biro Umum yang disusun	2 Dokumen

Dalam rangka melaksanakan program kegiatan, Pagu Alokasi Anggaran (awal) Setwantimpres terbagi 2 (dua) yaitu,

1. Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi dalam rangka penyusunan Nasihat dan Pertimbangan kepada Presiden, sebesar Rp2.454.416.000; dan
2. Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden, sebesar Rp29.257.274.000,00.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Laporan Kinerja Setwantimpres Tahun 2021

A. Capaian Kinerja Tujuan

Capaian tujuan Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sampai dengan tahun 2021 untuk periode Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2020-2024 mencapai 100%. Capaian tujuan Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sampai dengan tahun 2021 digambarkan melalui tabel berikut.

Tabel 3
Capaian Tujuan Strategis
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020 dan 2021

Tujuan Strategis	Indikator Tujuan Strategis	Capaian	
		2020	2021
Tercapainya tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	100%	100%

Capaian tujuan Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2021 mencapai 100%. Capaian tersebut digambarkan melalui tabel berikut.

Tabel 4
Capaian Tujuan Strategis
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2021

Tujuan Strategis	Indikator Tujuan Strategis	Capaian Tahun 2021
<p>Tercapainya tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden</p>	<p>Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden</p>	<p>100%</p>

B. Capaian Kinerja Sasaran

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menetapkan Sasaran Kinerja “Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden” yang keberhasilan capaiannya diukur melalui Indikator Kinerja “Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden”.

Sasaran beserta Indikator Kinerja tertuang pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2021.

1. Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja

Perhitungan nilai Indikator Kinerja “Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden”, diukur

melalui kuesioner **Tingkat Kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden**. Nilai tingkat kepuasan merupakan nilai rata-rata dari capaian tingkat kepuasan yang dihitung secara kumulatif dalam 12 bulan dari 9 (sembilan) responden yang merupakan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Penilaian tingkat kepuasan dihitung sebagai fungsi capaian persepsi kualitas layanan yang dinilai menggunakan skala Likert (Sangat Tidak Setuju =1 , Tidak Setuju = 2, Agak Tidak Setuju =3, Netral =4, Agak Setuju =5, Setuju =6, dan Sangat Setuju =7) atas 25 (dua puluh lima) pernyataan dari 10 (sepuluh) jenis layanan teknis dan administrasi yang diberikan oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

Setelah nilai total persepsi kualitas layanan diperoleh, kemudian dihitung nilai rata-rata sebagai skor persepsi kualitas layanan. Selanjutnya tingkat kepuasan dihitung sebagai persentasi capaian skor persepsi kualitas layanan dan dinilai berdasarkan kategorisasi sesuai rentang kepuasan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5
Penilaian Tingkat Kepuasan Dewan Pertimbangan presiden

Sangat Tidak Puas	Tidak Puas	Agak Tidak Puas	Netral	Agak Puas	Puas	Sangat Puas
1 – 14%	15 – 28%	29 – 43%	44 – 57%	58 – 71%	72 – 86%	87 – 100%

Formulasi penghitungan Indikator Kinerja "Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden" disajikan melalui tabel berikut.

Tabel 6
Formulasi Penghitungan Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Formulasi Penghitungan
<p>Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden</p>	<p>Formulasi Penghitungan: Rata-rata persentase kepuasan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden</p> <p>Tipe Penghitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kuesioner bulanan tentang tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas pelayanan teknis dan administrasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden</p> <p>Penjelasan: Data kuesioner “Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden” dinilai setiap bulan oleh Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, yang dihimpun setiap 2 bulan sekali, kemudian dihitung rata-ratanya setelah 12 bulan untuk mendapatkan nilai tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden</p> <p>Kuesioner meliputi penilaian kepuasan atas 10 jenis layanan yang diberikan oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, melalui Biro Data dan Informasi dan Biro Umum</p> <p>10 Jenis layanan yang dinilai meliputi penyediaan data dan informasi, koordinasi dengan instansi terkait, penyiapan bahan pertemuan dan dokumentasi, penyusunan draf laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden, pelayanan administrasi ketatausahaan, keuangan, keprotokolan, persidangan, sarana dan prasarana, serta administrasi kepegawaian</p>

2. Capaian Kinerja Sasaran

Tabel 7
Capaian Kinerja Sasaran
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	86%	92,20%	100%

C. Analisis Capaian Kinerja

1. Capaian Kinerja *Output*

Capaian Kinerja Sasaran yang diukur melalui indikator sasaran **Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden** didukung oleh capaian kinerja *output* yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tingkat Eselon II. Sasaran kegiatan perjanjian kinerja tingkat Eselon II yaitu.

- a. Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden dalam melaksanakan tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden;

- b. Terwujudnya dukungan pelayanan keprotokolan dan persidangan serta pelayanan administrasi umum di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.

Analisis capaian kinerja *output* dilakukan dengan membandingkan indikator kinerja pada sasaran dengan target yang ditetapkan.

Capaian kinerja *output* untuk sasaran tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden dalam melaksanakan tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden pada tahun 2021, diukur melalui 6 (enam) indikator, yaitu.

- a. **Persentase penyelesaian layanan perumusan nasihat dan pertimbangan Dewan Pertimbangan Presiden**

Capaian indikator kinerja persentase penyelesaian layanan perumusan nasihat dan pertimbangan Dewan Pertimbangan Presiden pada tahun 2021 adalah sebesar 100%.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, Anggota Wantimpres melakukan berbagai kegiatan rutin meliputi Audiensi kepada Presiden, Sidang Kabinet, Rapat Pleno, Kajian, Pertemuan Terbatas, Pertemuan Khusus, Penyerapan Aspirasi, Audiensi, Kunjungan Kerja, Forum Ilmiah, dan Kegiatan Tambahan. Biro Data dan Informasi memberikan dukungan layanan perumusan nasihat dan pertimbangan.

Pencapaian kinerja dihasilkan melalui dukungan layanan perumusan nasihat dan pertimbangan yang diselesaikan tepat waktu. Kegiatan penyelesaian layanan perumusan nasihat dan pertimbangan kepada Anggota Wantimpres dilakukan dengan memberikan dukungan layanan pada kegiatan-kegiatan Anggota Wantimpres yang meliputi kegiatan: audiensi kepada Presiden RI sebanyak 3 kali, sidang kabinet sebanyak 7 kali, sidang rapat pleno Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 28 kali, kajian sebanyak 7 kali, pertemuan terbatas sebanyak 55 kali, penyerapan aspirasi sebanyak 5 kali, menerima audiensi sebanyak 44 kali, pertemuan khusus sebanyak 23 kali, kunjungan kerja sebanyak 54 kali, mengikuti forum ilmiah sebanyak 47 kali dan kegiatan tambahan sebanyak 36 kali.

Capaian kinerja persentase penyelesaian layanan perumusan nasihat dan pertimbangan yang disampaikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2021 sama dengan capaian kinerja pada tahun 2020 yaitu sebesar 100%.

b. Persentase penyediaan data dan informasi serta analisis yang dibutuhkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

Capaian indikator kinerja persentase penyediaan data dan informasi serta analisis yang dibutuhkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada tahun 2021 adalah sebesar 100%. Pencapaian kinerja ini dihasilkan melalui kegiatan,

- 1) Pengumpulan data dan informasi melalui forum ilmiah, seminar dan Bakohumas sebanyak 35 kali;
- 2) Pengumpulan data dan informasi ke instansi pemerintah, organisasi politik, organisasi masyarakat, dan LSM sebanyak 10 kali;
- 3) Pendampingan Biro Data dan Informasi pada kegiatan kunjungan kerja Anggota Wantimpres sebanyak 14 kali;
- 4) Belanja *database* media sebanyak 2 paket;
- 5) Penyiapan bahan pertemuan Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 1 dokumen;
- 6) Pelaksanaan koordinasi dengan kementerian dan lembaga daerah/instansi terkait sebanyak 12 kali;
- 7) Pelaksanaan dokumentasi kegiatan Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 1 dokumen;
- 8) Penyusunan analisis substansif atas isu di bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat sebanyak 51 kali, penyusunan telaahan isu strategis sebanyak 28 kali, *policy brief* sebanyak 9 kali dan *policy paper* sebanyak 2 kali;
- 9) Monitoring media harian 249 kali.

Capaian kinerja persentase penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2021 sama dengan capaian kinerja pada tahun 2020 yaitu sebesar 100%.

c. Jumlah rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu

Capaian kinerja jumlah rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu adalah sebesar 2 dokumen (100%) dari dua dokumen yang ditargetkan, yaitu,

- 1) Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden Semester Pertama (Januari s.d. Juni) 2021;
- 2) Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden Semester Pertama (Juli s.d. Desember) 2021.

Capaian kinerja jumlah rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu, pada tahun 2021 sama dengan capaian kinerja pada tahun 2020 yaitu sebesar 2 dokumen (100%).

d. Persentase pelaksanaan layanan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden

Capaian kinerja Persentase pelaksanaan layanan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden pada tahun 2021 adalah sebesar 100%. Pencapaian kinerja ini dihasilkan melalui kegiatan,

- 1) Penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 23 kali;
- 2) Unggahan pada konten *Youtube*, media sosial dan *website*, masing-masing sebanyak,
 - *Youtube*: 34 unggahan video wawancara dan fitur Wantimpres;
 - *Instagram*: 277 postingan;
 - *Twitter*: 340 tweet;
 - *Facebook*: 296 postingan;
 - *Website*: 253 unggahan artikel;
- 3) Penyediaan Informasi Publik berupa,
 - a) Daftar Informasi Publik terbuka;
 - b) Profil Sekretariat Wantimpres;

- c) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - d) Kegiatan data dan kinerja, yang meliputi,
 - i. Rencana Strategis 2020-2024 (revisi 1);
 - ii. Rencana Kerja 2021;
 - iii. Laporan Kinerja Sekretariat Wantimpres 2020;
 - e) Informasi mengenai keuangan, yang meliputi,
 - i. Laporan Keuangan Tahun 2020 (Audited);
 - ii. RKA-KL 2021;
 - iii. DIPA 2022 – POK DIPA 2022;
 - iv. Data BMN 2020;
 - f) Rencana umum pengadaan barang dan jasa tahun 2020 dan 2021;
 - g) Peraturan-peraturan terkait Wantimpres dan Sekretariat Wantimpres;
 - h) Nota Kesepahaman antara Wantimpres dengan Badan Pusat Statistik;
 - i) Peraturan-peraturan mengenai Informasi Publik;
 - j) Buku dan Majalah Warta yang diterbitkan Setwantimpres.
- Capaian kinerja persentase pelaksanaan layanan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden pada tahun 2021 sebesar 100%.
- e. Persentase pelaksanaan pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang dibutuhkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan Sinergitas TIK di lingkungan Lembaga Kepresidenan**
- Capaian kinerja Persentase pelaksanaan pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang dibutuhkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan Sinergitas TIK di lingkungan Lembaga Kepresidenan pada tahun 2021 adalah sebesar 100%. Pencapaian kinerja ini dihasilkan melalui kegiatan,

- 1) Melakukan perawatan dan penyelesaian permasalahan terkait TIK (keamanan jaringan, website, sosial media, Youtube, dan aplikasi). Jumlah laporan monitoring jaringan dan keamanan siber selama tahun 2021 sebanyak 12 (dua belas) laporan,
- 2) Pengembangan desain website Wantimpres dengan pengembangan fitur Newsflow, dimana pada fitur Newsflow terdapat fasilitas untuk mencari berita berdasarkan keyword dan/atau tanggal berita,
- 3) Pelaksanaan rapat koordinasi Tim Gabungan TIK sebanyak satu kali selama tahun 2021, dengan Biro Infodatek Kemensetneg,
- 4) Penyusunan laporan tahunan tentang pengelolaan TIK tahun 2021;
- 5) Penyusunan Tim Penyusun Grand Design TIK Setwantimpres untuk periode tahun 2022-2026;

Capaian kinerja persentase pelaksanaan pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang dibutuhkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan sinergitas TIK di lingkungan Lembaga Kepresidenan pada tahun 2021 sebesar 100%.

f. Jumlah dokumen rencana kerja dan Laporan Kinerja Biro Data dan Informasi yang disusun

Capaian kinerja jumlah dokumen rencana kerja dan Laporan Kinerja Biro Data dan Informasi yang disusun adalah sebesar 2 dokumen (100%) dengan telah diselesaikannya dokumen:

- 1) Rencana Kerja Biro Data dan Informasi Tahun 2021;
- 2) Laporan Kinerja Biro Data dan Informasi Tahun 2020.

Capaian kinerja dokumen Rencana Kerja dan Laporan Kinerja Biro Data dan Informasi yang disusun pada tahun 2021 sama dengan capaian kinerja tahun 2020 yaitu sebesar 2 dokumen (100%). Kegiatan ini dilaksanakan tanpa dukungan anggaran.

Analisis capaian kinerja *output* dari sasaran kegiatan **Terwujudnya dukungan pelayanan keprotokolan dan persidangan serta pelayanan administrasi umum di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden**, pada tahun 2021, diukur melalui 10 (sepuluh) indikator, yaitu.

a. Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan

Capaian indikator kinerja persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan diperoleh dari jumlah pelayanan yang diberikan atas permintaan pelayanan keprotokolan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Capaian indikator kinerja ini sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Selama tahun 2021 telah dilaksanakan pemberian layanan keprotokolan atas permintaan layanan keprotokolan dari Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, total sebanyak 196 permintaan kegiatan pelayanan keprotokolan telah terlaksana seluruhnya di tahun 2021. Pelayanan keprotokolan yang telah dilaksanakan meliputi,

- 1) Pelayanan pendampingan kunjungan kerja Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 18 kali dan seluruhnya merupakan pendampingan kunjungan kerja dalam negeri;
- 2) Pelayanan keprotokolan pada pendampingan kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 178 kali;
- 3) Pelaksanaan Tata Usaha Perjalanan Dinas yang meliputi pelayanan yang terkait penerbitan Surat Perintah (Sprin), Surat Perjalanan Dinas (SPD), pengurusan dokumen perjalanan (*Passpor, exit permit, Visa*) dan pengurusan tiket pesawat. Selama tahun 2021, kegiatan pelaksanaan urusan tata usaha perjalanan dinas telah menerbitkan Sprin sebanyak 101, SPD Dalam Negeri sebanyak 590 SPD. Dikarenakan masih dalam kondisi pandemik, pelayanan administrasi perjalanan luar negeri tidak dilakukan oleh Subbagian Protokol.

Capaian indikator kinerja persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan

pada tahun 2021 sama dengan capaian pada tahun 2020, yaitu tercapai 100%.

b. Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan Persidangan

Capaian indikator kinerja persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan diperoleh dari jumlah pelayanan yang diberikan atas permintaan pelayanan persidangan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Capaian indikator kinerja ini sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Selama tahun 2020 telah dilaksanakan pemberian layanan persidangan atas permintaan layanan persidangan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Pelayanan persidangan yang telah dilaksanakan meliputi,

- 1) Pelayanan Persidangan pada acara pertemuan terbatas sebanyak 52 kali;
- 2) Pelayanan Persidangan pada acara Rapat Tim Kajian sebanyak 17 kali;
- 3) Tidak ada permintaan atas Pelayanan Persidangan pada acara Diskusi terbatas;
- 4) Pelayanan Persidangan pada acara sidang pleno sebanyak 7 kali;
- 5) Pelayanan Persidangan pada acara audiensi sebanyak 91 kali.

Capaian indikator kinerja persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan pada tahun 2021 sama dengan capaian pada tahun 2020, yaitu tercapai 100%.

c. Jumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan

Capaian kinerja jumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan sebesar 100% dari target 2 dokumen yang telah ditetapkan sebesar 100% telah terlaksana seluruhnya. Dokumen ketatausahaan tersebut yaitu,

- 1) Dokumen administrasi tata usaha pimpinan dan persuratan, meliputi,
 - a) Data Pengiriman Surat Nasihat dan Pertimbangan (NASTIM) Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 41 surat, antara lain Nastim Kolektif sebanyak 24 surat dan Nastim Perorangan sebanyak 17 surat;
 - b) Data Pengiriman surat keluar sebanyak 348 surat;
 - c) Data Surat keluar sebanyak 341 surat;
 - d) Data Memorandum keluar sebanyak 339 memorandum;
 - e) Data Pencatatan surat dan memorandum masuk sebanyak 3156;
 - f) Data Surat Perintah Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 82;
 - g) Pembuatan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 33 Keputusan.
- 2) Dokumen penyusutan arsip.
 - a) Pemusnahan Arsip Keuangan tahun 2007 s.d. 2009 Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
Pemusnahan Arsip Keuangan Tahun 2007 s.d. 2009 Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah dilaksanakan berdasarkan:
 - 1) Surat Kepala ANRI nomor B-KN.00.03/203/2021 tanggal 23 Juli 2021 hal Persetujuan Pemusnahan Arsip;
 - 2) Keputusan Seswantimpres nomor 16A tahun 2021 tentang Penetapan Pemusnahan Arsip Keuangan Tahun 2007 s.d. 2009 Sebanyak 406 (empat ratus enam) berkas di Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tanggal 30 Juli 2021.
 - b) Penyerahan Arsip Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2007 s.d. 2019.
Penyerahan Arsip Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2007 s.d. 2019 telah dilaksanakan berdasarkan,
 - 1) Surat Kepala ANRI nomor B-KN.00.04/3070/2021 tanggal 18 Oktober 2021 hal Persetujuan Penyerahan Arsip Statis;
 - 2) Keputusan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden nomor 25 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Penetapan

Penyerahan Arsip Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2007 s.d. 2019 Sebanyak 30 (tiga puluh) Nomor Arsip.

Capaian indikator kinerja Jumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan pada tahun 2021 sama dengan capaian pada tahun 2020, yaitu tercapai 100%.

d. Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan

Capaian indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran tahun 2021 sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan, sebanyak 10 Dokumen perencanaan program dan anggaran telah terselesaikan seluruhnya yaitu,

1) Dokumen Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun selama tahun 2021 sebanyak 2 dokumen yang meliputi Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon I dan II. Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut kemudian dihimpun bersama dengan Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III, IV dan pelaksana di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dan disampaikan kepada Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara melalui Surat Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Nomor: B-83/Set.Wantimpres/PR.00.03/03/2021 tanggal 30 Maret 2021.

2) Dokumen Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022

Dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022 Satker Dewan Pertimbangan Presiden, Biro Umum telah melaksanakan koordinasi internal dengan Biro Data dan Informasi sedangkan koordinasi eksternal dilaksanakan dengan Biro Perencanaan, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara, dan mitra kerja Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, serta Direktorat Alokasi Pendanaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Pagu Indikatif Satker Dewan Pertimbangan Presiden Tahun Anggaran 2022 sebagaimana Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-14/KSN

/S/PR.00.01/07/2021 tanggal 19 Juli 2021, yaitu sebesar **Rp34.551.280.000,00**.

3) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2022

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2022 yang telah tersusun selama tahun 2021 sebanyak 2 dokumen yaitu,

a) RKA-K/L Berdasarkan Pagu Anggaran Tahun 2022

Pagu Anggaran yang diterima Satker Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2022 tercantum dalam Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-42/KSN/S/PR.00.01/07/2021 tanggal 29 Juli 2021 adalah sebesar **Rp34.551.280.000,00**, Pagu tersebut tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan Pagu Indikatif sebesar **Rp34.551.280.000,00**. Berdasarkan Pagu Anggaran disusunlah RKA-K/L yang teralokasikan pada 2 (dua) program, sebagai berikut:

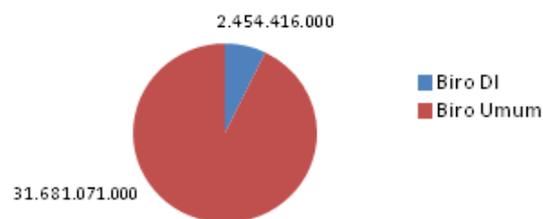
- (1) Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden (007.07.CA) sebesar **Rp2.454.416.000,00**;
- (2) Program Dukungan Manajemen (007.07.WA) sebesar **Rp32.096.864.000,00**;

b) RKA-K/L Berdasarkan Alokasi Anggaran Tahun 2022

Satker Dewan Pertimbangan Presiden memperoleh Alokasi Anggaran Tahun 2022 sebesar **Rp33.929.987.000,00** sebagaimana Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-08/KSN/S/PR.00.01/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021. Alokasi tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp623.293.000,00** dibandingkan dengan Pagu Anggaran. Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan melalui koordinasi internal dengan Biro Data dan Informasi serta koordinasi eksternal dengan pihak Biro Perencanaan, Sekretariat Kementerian, Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara dan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan yang hasilnya mengalokasikan anggaran sebesar **Rp33.929.987.000,00**

bagi pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara yang terdiri dari 2 (dua) program, sebagai berikut,

- (1) Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden (007.07.CA) sebesar **Rp2.454.416.000,00**;
- (2) Program Dukungan Manajemen (007.07.WA) sebesar **Rp31.681.071.000,00**.



Gambar III. 1 Diagram Pembagian Anggaran Berdasarkan Biro

4) Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022

Penyusunan RKA KL menjadi dasar penyusunan DIPA yang merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar pengeluaran anggaran atau pencairan dana atas beban APBN. DIPA Satker Dewan Pertimbangan Presiden diserahkan melalui Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-06/KSN/S/PR.00.04/12/2021 tanggal 6 Desember 2021 Nomor DIPA Induk SP DIPA-007.07-0/2022 tanggal DIPA 17 November 2021 dengan alokasi anggaran sebesar **Rp33.929.987.000,00**.

5) Dokumen Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Tahun Anggaran 2022

Dengan telah ditetapkannya DIPA Induk dan DIPA Petikan Tahun 2022 oleh Menteri Keuangan, maka Kuasa Pengguna Anggaran diharuskan untuk menyusun POK DIPA sebagai dasar pelaksanaan

anggaran dan kegiatan. POK DIPA Tahun Anggaran 2022 yang telah dihasilkan sebanyak 3 dokumen, yaitu,

- a) POK DIPA Satker Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2022;
- b) POK DIPA Kegiatan Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Tahun 2022;
- c) POK DIPA Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2022.

Selanjutnya, POK DIPA dimaksud ditetapkan oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2022.

6) Dokumen Rencana Strategis (Renstra)

Pada Tahun 2021 Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah diperbaiki sehubungan dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2020. Revisi Kesatu Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020-2024 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden nomor 28 Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021. Selanjutnya melalui memorandum Nomor: M-26/Set.Wantimpres/Um/PR.00.00/01/2022, Kepala Biro Umum telah menyampaikan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Revisi Kesatu kepada Kepala Biro Data dan Informasi dan para pejabat setingkat eselon III dan IV di Lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

Capaian indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan pada tahun 2021 sama dengan capaian pada tahun 2020, yaitu tercapai 100%.

e. Jumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan sesuai standar

Capaian indikator kinerja dokumen kepegawaian yang diselesaikan sesuai standar tahun 2021 sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan, sebanyak 1 dokumen kepegawaian telah terselesaikan seluruhnya. Dokumen kepegawaian merupakan dokumen pertanggungjawaban kegiatan tata usaha kepegawaian, *cascading*

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Verifikasi Pemutakhiran Data Mandiri (PDM), Penyelesaian Dokumen Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), kepangkatan, mutasi, pemberhentian, pensiun, dan pengembangan pegawai, serta pembinaan kepegawaian lainnya yang berjalan sepanjang tahun 2021.

Capaian indikator kinerja jumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan sesuai standar pada tahun 2021 sama dengan capaian pada tahun 2020, yaitu tercapai 100%.

f. Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan

Capaian indikator kinerja jumlah dokumen penyelenggaraan urusan keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan, tahun 2021 sebesar 100%. Target yang tercantum dalam perjanjian kinerja untuk indikator ini sebanyak 9 Dokumen telah diselesaikan seluruhnya. Dokumen penyelenggaraan urusan keuangan yang telah diselesaikan tersebut yaitu,

1) Dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020 telah disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara dan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara melalui Surat Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Nomor B-54/Ses.Wantimpres/KU.06.02/02/2021 tanggal 26 Februari 2021;

2) Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020 *Unaudited*

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020 *Unaudited* telah selesai disusun dan disampaikan kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melalui Surat Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Nomor: B-26/Ses.Wantimpres/KU.04.00/02/2021 tanggal 1 Februari 2021;

3) Laporan Keuangan Tahunan *Audited*

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020 *Audited* telah selesai disusun dan disampaikan kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melalui Surat Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Nomor: B-106/Ses.Wantimpres/KU.04.00/04/2021 tanggal 30 April 2021;

4) Laporan Keuangan Semester I

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Semester I Tahun 2021 telah selesai disusun dan disampaikan kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melalui Surat Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Nomor: B-173/Ses.Wantimpres /KU.04.00/07/2021 tanggal 26 Juli 2021;

5) Laporan Keuangan Triwulan III

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Triwulan III Tahun 2021 telah selesai disusun dan disampaikan kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melalui Surat Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Nomor: B-261/Ses.Wantimpres/KU.04.00/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021;

6) Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2021 telah dievaluasi pada Bulan Agustus 2021 oleh Inspektorat, Kementerian Sekretariat Negara dan mendapat nilai **94,59** dengan predikat “AA” (Memuaskan). Jika dibandingkan dengan nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun anggaran 2020 dengan nilai **91,12**, nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar **3,47**;

7) Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran yang telah dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden selama tahun 2021 berupa pencocokan dan penelitian data realisasi anggaran

serta mengidentifikasi capaian realisasi belanja setiap kegiatan dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran. Evaluasi atas pelaksanaan anggaran Tahun 2021 telah dilaksanakan pada tanggal 28 sampai dengan 11 Oktober 2021;

8) Dokumen Rekonsiliasi Keuangan

Rekonsiliasi antara UAKPA dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dilaksanakan setiap bulan. Rekonsiliasi merupakan proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem yang berbeda dengan sumber yang sama. Dokumen Rekonsiliasi merupakan dokumen data transaksi keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara berupa Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dewan Pertimbangan Presiden dan Kuasa Bendahara Umum Negara;

9) Dokumen Perbendaharaan

Dokumen perbendaharaan yang dihasilkan setiap bulan berupa,

a) Buku Kas Umum;

b) Buku Pembantu Pajak;

c) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara.

Capaian indikator kinerja jumlah dokumen penyelenggaraan urusan keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan pada tahun 2021 sama dengan capaian pada tahun 2020, yaitu tercapai 100%.

g. Jumlah dokumen Administrasi penyediaan sarana dan prasarana yang diselesaikan sesuai standar

Capaian indikator kinerja dokumen administrasi penyediaan sarana dan prasarana yang diselesaikan sesuai standar, sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan, sebanyak 1 dokumen telah terlaksana seluruhnya. administrasi penyediaan sarana dan prasarana meliputi dokumen pertanggungjawaban atas kegiatan penyediaan sarana dan prasarana selama tahun 2021. Dokumen administrasi penyediaan sarana dan prasarana meliputi,

1) Penatausahaan Barang

Pelaksanaan kegiatan penatausahaan barang perlengkapan/peralatan kantor dan kendaraan meliputi serangkaian prosedur manual maupun komputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pembuatan ikhtisar, sampai dengan pelaporan Barang Milik Negara.

Output dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah:

- a) Laporan BMN dan Persediaan Tahunan 2020 *Audited*;
- b) Laporan BMN dan Persediaan Triwulan I dan III T.A 2021;
- c) Laporan BMN dan Persediaan Semester I Tahun 2021;
- d) Laporan BMN dan Persediaan Tahunan 2021 *Unaudited*;
- e) Laporan Wasdal (Pengawasan dan Pengendalian) BMN T.A. 2021;
- f) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) T.A. 2023;
- g) Label Inventaris Barang.

2) Pemeliharaan/Perawatan Barang

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan/perawatan barang yang dilaksanakan meliputi,

- a) Pemeliharaan kendaraan operasional milik Setwantimpres berupa perbaikan, perawatan dan penggantian suku cadang kendaraan sebanyak 6 kegiatan;
- b) Mengkoordinasikan perawatan, perpanjangan masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan dinas Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dengan Bagian Kendaraan, Biro Umum, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara sebanyak 9 kegiatan;
- c) Mengkoordinasikan perawatan kendaraan sewa untuk Sekretaris, Kepala Biro dan kendaraan operasional di Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dengan pihak penyedia (Universal) sebanyak 36 kali;
- d) Perpanjangan Masa Berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) roda 4 milik Setwantimpres sebanyak 2 kegiatan;

- e) Pembelian Rutin Bulanan Voucher Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk untuk operasional kendaraan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang telah dilaksanakan sebanyak 12 kali;
 - f) Pelaksanaan perbaikan, perawatan, penggantian inventaris dan peralatan kantor sebanyak 63 kegiatan;
 - g) Pelaksanaan pengendalian hama/*pest control* Gedung Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 9 kali;
 - h) Pelaksanaan penyemprotan disinfektan Gedung Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 23 kali;
 - i) Pencucian perlengkapan rumah tangga berupa peralatan prasmanan, jamuan dan lain-lain sebanyak 3 kegiatan;
 - j) Kegiatan pemeliharaan gedung kantor meliputi instalasi mekanikal dan elektrikal;
 - k) Melaksanakan perbaikan, pemeliharaan, perawatan gedung Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 29 kegiatan.
- Capaian indikator kinerja jumlah dokumen administrasi penyediaan sarana dan prasarana yang diselesaikan sesuai standar pada tahun 2021 sama dengan capaian pada tahun 2020, yaitu tercapai 100%.

h. Persentase penyediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan

Capaian indikator kinerja Persentase penyediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Penyediaan sarana dan prasarana yang telah direncanakan dan dianggarkan telah terpenuhi seluruhnya melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui Pelelangan Sederhana dan Pengadaan Langsung.

Pengadaan barang/jasa yang terdiri dari barang persediaan dan barang modal berdasarkan POK DIPA Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut,

1) Pengadaan Langganan Barang dan Jasa

- a) Langganan Jasa Media Monitoring (IMM), selama 11 bulan;
- b) Langganan Jasa Promosi Media Sosial, selama 3 bulan;
- c) Langganan Hukumonline, selama 12 bulan;
- d) Langganan surat kabar/majalah lokal dan internasional, selama 12 bulan;
- e) Langganan Internet VPN-IP, selama 12 bulan;
- f) Sewa 3 unit Mesin Fotokopi Digital (BW) dan 1 unit Mesin Fotokopi Berwarna, selama 12 bulan;
- g) Sewa 1 unit kendaraan dinas Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden, 8 unit kendaraan dinas Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, 2 unit kendaraan dinas pejabat Eselon II, 2 unit kendaraan operasional Pejabat Setingkat Menteri, dan 8 unit kendaraan operasional Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, selama 12 bulan;
- h) Pemeliharaan Gedung dan Halaman di Kantor Dewan Pertimbangan Presiden Tahun Anggaran 2021, selama 12 bulan;
- i) Pekerjaan Pengendalian Hama (*General Pest Control*), selama 9 bulan;
- j) Pemeliharaan Instalasi Mekanikal, selama 12 bulan;
- k) Pemeliharaan Instalasi Listrik, selama 12 bulan;
- l) Pekerjaan Pemeliharaan Sistem Jaringan Internet, selama 12 bulan;
- m) Perpanjangan Lisensi *Hardware* dan *Software (Renewal ICT)*, sebanyak 1 paket;
- n) Langganan TV Kabel (IndiHome) untuk 12 bulan;
- o) Pengharum ruangan untuk 12 bulan;
- p) Langganan Aplikasi Zoom Meeting, selama 12 bulan;
- q) Langganan Data Ekonomi (CEIC), selama 10 bulan;
- r) Pengadaan Vitamin, selama 10 bulan;

s) Pekerjaan Penyemprotan Disinfektan, selama 10 bulan.

2) Pengadaan Barang Persediaan

a) Pengadaan barang keperluan kantor:

(1) Laminating, penjilidan dan penggandaan sebanyak 9 paket;

(2) Pencetakan sebanyak 31 paket;

(3) Pengadaan buku agenda kerja, sebanyak 1 paket;

(4) Pengadaan kalender meja, sebanyak 1 paket.

b) Pengadaan alat tulis kantor (ATK), sebanyak 4 paket;

c) Pengadaan suku cadang elektrik, sebanyak 1 paket;

d) Pengadaan keperluan rumah tangga, sebanyak 6 paket;

e) Pengadaan keperluan komputer, sebanyak 5 paket;

f) Pengadaan meterai, sebanyak 2 paket;

g) Pengadaan hand sanitizer dan disinfektan, sebanyak 2 paket;

h) Pengadaan masker, sebanyak 1 paket;

i) Pengadaan plastik GeNose dan hepa filter, sebanyak 7 paket;

j) Pengadaan barang persediaan bahan baku, sebanyak 12 paket;

k) Pengadaan barang persediaan strategis, sebanyak 13 paket;

l) Pengadaan pakaian dinas, sebanyak 1 paket.

3) Pengadaan Barang Modal

a) 3 (tiga) unit hard disk eksternal;

b) 1 (satu) unit Karcher;

c) 1 (satu) set peralatan media sosial;

d) 10 (sepuluh) unit laptop;

e) 2 (dua) set monitor dan web conference;

f) 4 (empat) unit PC;

g) 1 (satu) unit termometer;

h) 1 (satu) unit GeNose;

i) 9 (sembilan) unit AC Split;

j) 21 (dua puluh satu) unit CCTV;

k) 1 (satu) paket pengadaan furnitur Ruang Rapat Kresna;

l) 1 (satu) paket pengadaan furnitur Ruang Kerja Lantai 2;

m) 10 (sepuluh) unit kursi tamu;

n) 6 (enam) unit *coffee table*;

- o) 2 (dua) unit meja penandatanganan;
- p) 1 (satu) unit *mobile wireless soundsystem*;
- q) 1 (satu) unit bor wireless;
- r) 5 (lima) unit tv 55 inch dan *bracket*;
- s) 2 (dua) unit lambang garuda;
- t) 7 (tujuh) unit handy talky (HT).

4) Pengadaan Pelayanan Jamuan

Pelaksanaan pelayanan jamuan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan acara/rapat Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan rapat Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Selama tahun 2021 telah dilakukan pengadaan pelayanan jamuan untuk acara/rapat Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, sebagai berikut,

- a) Pertemuan Terbatas;
- b) Kajian;
- c) Sidang Pleno;
- d) Audiensi.

Capaian indikator kinerja persentase penyediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan pada tahun 2021 sama dengan capaian pada tahun 2020, yaitu tercapai 100%.

i. **Persentase penerapan *E-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa**

Capaian indikator kinerja ini sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, telah dilaksanakan 2 paket pekerjaan tender pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2021 yang meliputi:

- 1) Pemeliharaan Gedung dan Halaman di Kantor Dewan Pertimbangan Presiden Tahun Anggaran 2021;
- 2) Pekerjaan Sewa Kendaraan Dinas Pejabat dan Kendaraan Operasional di Kantor Dewan Pertimbangan Presiden Tahun Anggaran 2021;
- 3) Langganan Data Ekonomi/CEIC.

Capaian indikator kinerja persentase penerapan *E-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa pada tahun 2021 sama dengan capaian pada tahun 2020, yaitu tercapai 100%.

j. Jumlah dokumen rencana kerja dan Laporan Tahunan Biro Umum yang disusun

Capaian indikator kinerja jumlah dokumen rencana kerja dan Laporan Tahunan Biro Umum yang disusun, pada tahun 2021 adalah sebesar 100%. Pencapaian kinerja ini sebanyak dua dokumen dari dua dokumen yang ditargetkan, yaitu,

- 1) Dokumen rencana kerja berupa dokumen Rencana Aksi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2021;
- 2) Laporan Tahunan Biro Umum berupa dokumen Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2020.

Capaian indikator kinerja jumlah dokumen rencana kerja dan Laporan Tahunan Biro Umum yang disusun, pada tahun 2021 sama dengan capaian pada tahun 2020, yaitu tercapai 100%.

2. Analisis Capaian Kinerja *Outcome*

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis, meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, dicapai dengan indikator, tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Capaian indikator kinerja tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden tahun 2021 tersebut 100%, dari target 86% tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden, pada tahun 2021 terealisasi sebesar 92,20%.

Capaian Indikator Kinerja diperoleh melalui kuesioner Penilaian Tingkat Kepuasan Layanan yang diisi oleh Anggota Dewan Pertimbangan Presiden setiap bulan.

Kuesioner yang diajukan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden tersebut terdiri dari 25 pernyataan kualitas layanan, meliputi 10 jenis layanan, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 8
Jenis Layanan dan Pernyataan Kualitas Layanan
Penilaian Tingkat Kepuasan

Jenis Layanan		Pernyataan Kualitas Layanan	
1	Koordinasi dengan Instansi Terkait	1	Sekretariat telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka permintaan data dan informasi yang dibutuhkan Dewan Pertimbangan Presiden

Jenis Layanan		Pernyataan Kualitas Layanan	
		2	Sekretariat telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan kunjungan kerja, Pertemuan Terbatas, Kajian, Diskusi Terbatas, dan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden
2	Penyediaan Data dan Informasi	3	Sekretariat telah menyediakan laporan hasil kunjungan kerja Dewan Pertimbangan Presiden (dalam dan luar negeri) sesuai ketentuan
		4	Sekretariat telah membuat analisis di bidang Politik, Hukum, Keamanan Negara, Perekonomian, dan Kesejahteraan Rakyat yang dibutuhkan Dewan Pertimbangan Presiden
		5	Sekretariat telah menyediakan Kliping rutin dan khusus yang dibutuhkan Dewan Pertimbangan Presiden
3	Penyiapan bahan dan dokumentasi pertemuan	6	Sekretariat telah menyiapkan bahan Sidang, Pertemuan Terbatas, Kajian, Diskusi Terbatas, dan pertemuan lainnya yang dibutuhkan Dewan Pertimbangan Presiden
		7	Sekretariat telah membuat Notulensi Sidang, Pertemuan Terbatas, Kajian, Diskusi Terbatas, dan pertemuan lainnya yang dibutuhkan Dewan Pertimbangan Presiden
		8	Sekretariat telah membuat dokumentasi audio kegiatan Kunjungan Kerja, Pertemuan Terbatas, Kajian, Diskusi Terbatas, dan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden
		9	Sekretariat telah membuat dokumentasi foto kegiatan Kunjungan Kerja, Pertemuan Terbatas, Kajian, Diskusi Terbatas, dan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden
4	Penyusunan Draft Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden	10	Sekretariat telah menyiapkan bahan penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden

Jenis Layanan		Pernyataan Kualitas Layanan	
5	Pelayanan Keprotokolan	11	Sekretariat telah memberikan pelayanan keprotokolan pada Kunjungan Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri sesuai ketentuan.
		12	Sekretariat telah memberikan pelayanan penyiapan dokumen perjalanan dinas luar negeri (Paspor dinas, Visa, Exit Permit) sesuai ketentuan
		13	Sekretariat telah memberikan pelayanan keprotokolan pada Acara/Undangan di luar yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
6	Pelayanan Persidangan	14	Sekretariat telah memberikan pelayanan persidangan (logistik dan tata tempat) sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden
7	Pelayanan Keuangan	15	Sekretariat telah memberikan pelayanan gaji sesuai ketentuan
		16	Sekretariat telah memberikan pelayanan Dana Operasional Anggota sesuai ketentuan
		17	Sekretariat telah memberikan pelayanan Biaya Perjalanan Dinas sesuai ketentuan
		18	Sekretariat telah memberikan pelayanan Biaya Kegiatan Pertemuan Terbatas dan Diskusi Terbatas sesuai ketentuan
		19	Sekretariat telah memberikan pelayanan perencanaan anggaran sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden
8	Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	20	Sekretariat telah memberikan pelayanan Tata Usaha Pimpinan sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden
9	Administrasi Kepegawaian	21	Sekretariat telah memberikan pelayanan pembuatan SK, Surat Perintah, dan persuratan lainnya sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden
10	Pelayanan Sarana dan Prasarana	22	Sekretariat telah memberikan pelayanan jamuan sidang, rapat, dan pertemuan sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden

Jenis Layanan		Pernyataan Kualitas Layanan	
		23	Sekretariat telah menyediakan pelayanan sarana ruangan kerja (meubelair) sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden
		24	Sekretariat telah menyediakan pelayanan peralatan perkantoran (telepon, fax, komputer, printer, scanner, perangkat akses wifi) sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden
		25	Sekretariat telah menyediakan pelayanan kendaraan sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden

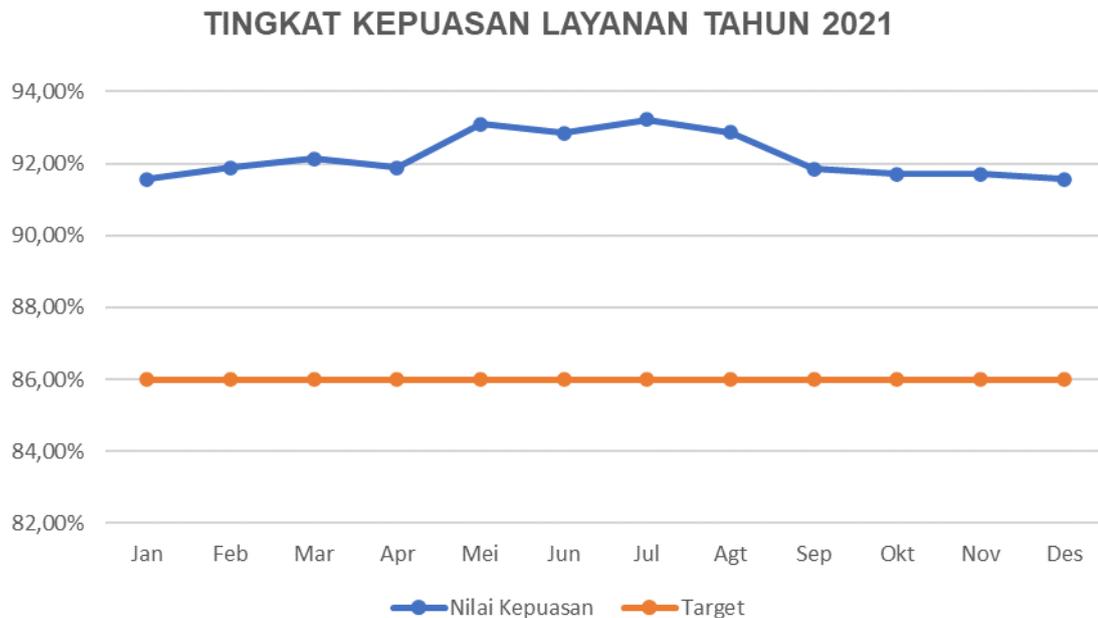
Tahun 2021, Perhitungan nilai rata-rata persepsi kepuasan dari Anggota Dewan Pertimbangan Presiden secara tahunan diperoleh nilai **6,45** (dari skala maksimum 7) sehingga diperoleh Nilai Tingkat Kepuasan sebesar **92,20%** dengan peringkat Tingkat Kepuasan Layanan “Sangat Puas”.

Capaian Nilai Tingkat Kepuasan sebesar **92,20%**, melebihi target yang ditetapkan sebesar **86%**.

Tingkat Kepuasan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dihitung berdasarkan 10 jenis layanan, capaian Skor Persepsi Kualitas Layanan ditunjukkan tabel dan grafik sebagai berikut.

Tabel 9
Tingkat Kepuasan Layanan Tahun 2021

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Rata-rata
Nilai Kepuasan	91,56%	91,89%	92,14%	91,89%	93,10%	92,86%	93,22%	92,87%	91,86%	91,71%	91,71%	91,57%	92,20%
Target	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%



Gambar III. 2 Diagram Tingkat Kepuasan Layanan Tahun 2021

3. Faktor Pendukung Keberhasilan

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berhasil memperoleh rata-rata capaian kinerja sasaran strategis pada tahun 2021 sebesar 100%. Keberhasilan ini didukung oleh,

- a. Komitmen pimpinan dan pegawai Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pimpinan mengarahkan setiap bagian dalam organisasi agar memperhatikan pencapaian target, serta proaktif memonitor dan mengevaluasi pencapaian target kinerja;
- b. Sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi tinggi sehingga meningkatkan kinerja produktifitas individu maupun organisasi;
- c. Pemanfaatan sistem informasi yang tersedia antara lain seperti SIMPEL, SAKTI;
- d. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, antara lain tergabung sebagai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pelaksana Kemensetneg, Pengelolaan Layanan Kehumasan;

- e. Penguatan koordinasi internal antar unit kerja di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden maupun dengan para Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
- f. Peningkatan sinergitas dengan *stakeholder* eksternal di tingkat Kementerian/Lembaga terkait.

4. Permasalahan/Kendala dan Solusi

Capaian kinerja *outcome/output* Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2021 rata-rata mencapai 100%. Walaupun demikian dalam pencapaian *outcome/output* 100% tersebut ada permasalahan/kendala yang dihadapi. Permasalahan/kendala yang dihadapi selama tahun 2021 ini dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 10
Permasalahan/Kendala dan Solusi pada Tahun 2021

No	Permasalahan	Solusi
1.	Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020.	<p>a. Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden selama tahun 2021 tetap melaksanakan penyesuaian Sistem Kerja WFO dan WFH yang mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan SE Nomor 24 Tahun 2021 tentang perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem kerja Pegawai Negeri Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019.</p> <p>b. Memberlakukan pembatasan</p>

No	Permasalahan	Solusi
		<p>perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat.</p> <p>c. Melaksanakan relokasi anggaran dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 antara lain untuk,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19 antara lain, Hand Sanitizer dan Disinfektan, Masker, Plastik Genos dan Sarung Tangan; • Belanja Jasa Penanganan Pandemi COVID-19 antara lain, penyemprotan Disinfektan, Tes Antigen dan PCR bagi pejabat dan pegawai Setwantimpres; • Belanja Modal Penanganan Pandemi COVID-19 antara lain Mesin GeNose dan <i>Face Thermal (Termometer Face Recognition)</i>. <p>d. Tindak lanjut atas hasil Real Test Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) bagi pejabat dan pegawai Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang dinyatakan positif COVID-19 dengan melakukan tracing kepada keluarga inti serta pihak yang berkontak erat dan memfasilitasi pelaksanaan isolasi mandiri dan perawatan di Wisma Atlet Kemayoran.</p> <p>e. Pelaksanaan Vaksinasi dosis pertama dan kedua pada bulan Maret 2021.</p>

No	Permasalahan	Solusi
2.	Dilaksanakan penghematan anggaran dalam rangka penanggulangan Covid-19.	<p>Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden melaksanakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya penghematan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Penghematan anggaran yang telah dilaksanakan selama T.A. 2021 sebanyak tiga kali, yaitu penghematan pada revisi DIPA pertama sebesar Rp66.522.000,00 revisi DIPA ke-3 sebesar Rp186.753.000,00, revisi DIPA ke-4 sebesar Rp2.068.879.000,00 sebesar sehingga anggaran setelah revisi menjadi Rp31.610.023.000,00, dari anggaran awal sebesar Rp33.932.177.000,00.</p> <p>Atas hal tersebut di atas, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden melakukan penjadwalan ulang kegiatan-kegiatan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia setelah penghematan.</p>
3.	Kondisi sarana yang kurang memadai.	<p>Melaksanakan monitoring kondisi sarana secara berkala dan melakukan perbaikan sarana yang rusak. Selama tahun 2021 telah dilaksanakan perbaikan maupun pemeliharaan peralatan komputer serta penambahan jumlah sarana penunjang antara lain,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Komputer dan laptop; b. Alat perawatan kendaraan berupa <i>Car washer</i>; c. Alat Kantor dan Rumah Tangga,

No	Permasalahan	Solusi
		<p>berupa AC, CCTV, Televisi, peralatan furnitur; dan</p> <p>d. Alat Studio dan Komunikasi, berupa <i>camera conference</i>, kamera digital, lampu <i>blitz</i> kamera, <i>microphone clippon</i>, tripod kamera dan <i>handy talkie</i>.</p>
4.	Kondisi prasarana yang kurang memadai.	<p>Monitoring secara intensif terhadap keberadaan dan kualitas prasarana di Gedung Setwantimpres. Selama tahun 2021 telah dilakukan monitoring dan tindaklanjut perbaikan prasarana untuk meningkatkan kualitas layanan, antara lain,</p> <p>a. renovasi toilet pria dan wanita yang terletak di lantai 2 bagian belakang Gedung Setwantimpres;</p> <p>b. renovasi atap Dak Gedung Setwantimpres.</p>
5.	Kebijakan restrukturisasi organisasi menuntut penyesuaian <i>layout</i> ruang kerja, sehingga posisi/letak tempat duduk dan meja kerja para pejabat/pegawai jabatan fungsional dapat membaaur dengan pejabat/pegawai lainnya untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.	<p>Selama tahun 2021 Setwantimpres telah melaksanakan pengadaan pekerjaan <i>working station</i> pada lantai 2 Gedung Setwantimpres. Pengadaan <i>working station</i> dimaksud selain untuk mendukung kebijakan restrukturisasi organisasi juga dimaksudkan untuk mengubah tata letak ruang kerja sehingga menciptakan suasana kerja yang mendukung efektivitas dan fleksibilitas pekerjaan para pejabat/pegawai kantor Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.</p>

No	Permasalahan	Solusi
6.	Kekurangan Sumber Daya Manusia.	<p>a. Mengajukan permintaan pegawai kepada Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.</p> <p>b. Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mendorong pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas pegawai, dengan mengikutsertakan pejabat dan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan kompetensi ASN (PPKASN) Kementerian Sekretariat Negara maupun pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan di luar Instansi.</p> <p>c. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengurangi beban pegawai.</p> <p>d. Untuk memenuhi tenaga teknis sebagai pelaksana pelayanan, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden merekrut Pegawai Tidak Tetap (PTT). PTT tersebut bertugas sebagai Satpam, Pramubhakti, dan Pengemudi.</p>

No	Permasalahan	Solusi
7.	Kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang bersifat dinamis.	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan koordinasi antara Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dengan Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. b. Melaksanakan revisi anggaran sesuai kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. c. Menyesuaikan kegiatan Anggota Wantimpres dengan kondisi selama Pandemi COVID-19 dari Luar Jaringan menjadi Dalam Jaringan.
8.	Keterbatasan SDM yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan teknis bidang TIK	<ul style="list-style-type: none"> a. Melanjutkan kerjasama teknis dengan Biro Informasi dan Teknologi, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Presiden yang telah terjalin sejak tahun 2020. b. Membentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2021 melalui Surat Keputusan Sekretaris Wantimpres Nomor 28 Tahun 2020, tanggal 30 Desember tahun 2020.
9.	Perubahan proses bisnis karena dinamika organisasi	Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah dilaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring Media yang merupakan pedoman yang bersifat operasional, teknis untuk menunjukkan hierarki, <i>work flow</i> sebuah proses kegiatan yang didalamnya mencakup dasar aturan, baku mutu, pelaksana, tools yang dipergunakan,

No	Permasalahan	Solusi
		proses input dan output, reuiu, standar waktu dan tahapan proses bisnis.
10.	Masalah Keamanan Aplikasi	Melakukan pengecekan terhadap fungsionalitas aset aset VM (<i>Virtual Machine</i>) yang dimiliki Setwantimpres pada <i>Colocation</i> di Biro Infodatek Kementerian Sekretariat Negara.
11.	Masalah Keamanan Jaringan	<p>a. Melaksanakan kegiatan pengamanan jaringan dilakukan dengan melakukan monitoring perangkat jaringan yang terdiri dari <i>coreswitch</i>, <i>wifi controller</i> dan <i>switch</i>. Kondisi yang di monitor berupa availability perangkat, status port, utilitas perangkat, serta ketersediaan koneksi internet dan intranet.</p> <p>b. Melakukan pergantian <i>password</i> perangkat <i>switch</i> dan <i>firewall</i>.</p> <p>c. Melakukan <i>upgrade</i> dan perpanjangan lisensi <i>OS Switch /firewall</i>.</p> <p>d. Perpanjangan lisensi antivirus <i>Trendmicro</i>.</p> <p>e. Melakukan sosialisasi keamanan informasi berdasarkan hasil monitoring jaringan melalui penerbitan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Himbauan Keamanan Informasi Pencegahan dan Penanganan <i>Ransomware</i>.</p> <p>f. Melakukan sosialisasi pemanfaatan teknologi dan layanan yang ada di lingkungan Kemensetneg melalui <i>leaflet</i> penggunaan <i>Scloud</i>.</p>

No	Permasalahan	Solusi
		g. Mengikuti webinar dengan topik bidang keamanan siber.
12.	Masalah Keamanan <i>Website</i>	<p>a. Melaksanakan kegiatan monitoring keamanan website dilakukan dengan memantau akses dan serangan terhadap website Wantimpres. Website telah dilindungi oleh beberapa layer keamanan antara lain <i>Firewall</i>, <i>Web Application Firewall (WAF)</i>, dan <i>Deep Security Manager</i>.</p> <p>b. Melakukan pengujian (<i>penetration test</i>) <i>Website</i> Wantimpres.</p> <p>c. Melakukan pembaharuan <i>plugin website</i>.</p>

D. Perbandingan Capaian Kinerja *Outcome*

1. Perbandingan realisasi Capaian Kinerja *Outcome* dengan target tahun 2021.

Capaian sasaran strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden jika dibandingkan dengan target selama tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 11
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	86%	92,20%	100%

Capaian kinerja sasaran strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden pada tahun 2021 adalah 100%. Dari 86% target yang telah ditentukan terealisasi sebanyak 92,20%.

2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja *Outcome* tahun 2020 dan tahun 2021.

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja *Outcome* tahun 2020 dan tahun 2021, digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis
Tahun 2020 dan Tahun 2021

Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	85%	93,60 %	100%	86%	92,20 %	100%

Jika dibandingkan dengan Realisasi Capaian Kinerja *Outcome* tahun 2020, Realisasi Capaian Kinerja *Outcome* pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,4% hal tersebut karena adanya gelombang kedua Covid-19 di pertengahan tahun 2021, mempengaruhi rencana kegiatan Anggota Wantimpres.

3. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja *Outcome* tahun 2021 dengan target jangka menengah.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020-2024, maka Capaian Kinerja *Outcome* tahun 2021 dengan target jangka menengah memuat informasi capaian sampai dengan tahun 2021.

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja *Outcome* tahun 2021 dengan target jangka menengah digambarkan melalui tabel berikut.

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Outcome tahun 2021 dengan target jangka menengah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH					REALISASI					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020			2021		
							Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	85%	86%	88%	91%	95%	85%	93,60%	100%	86%	92,20%	100%

E. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam penggunaan dana yang ekonomis, efektif dan efisien.

1. Pagu Alokasi Anggaran dan Penyerapan Anggaran

Alokasi anggaran belanja yang termuat dalam dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dewan Pertimbangan Presiden TA 2021 Nomor SP DIPA-007.07.1.500592/2021 tanggal 23 November 2020 sebesar Rp33.932.177.000,00. Selama Tahun 2021 telah dilakukan 15 kali revisi yaitu 9 (sembilan) kali revisi POK dan 6 (enam) kali revisi DIPA. Pagu anggaran setelah revisi setelah penghematan menjadi Rp31.610.023.000,00, dari anggaran awal sebesar Rp33.932.177.000,00.

Rincian alokasi anggaran tahun 2021 berdasarkan per kegiatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 14
Alokasi Anggaran Setelah Revisi Per Kegiatan TA 2021

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Persentase dari Pagu (%)
Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi dalam rangka penyusunan Nasihat dan Pertimbangan kepada Presiden	2.352.749.000,00	7,44
Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden	29.257.274.000,00	92,56
Jumlah	31.610.023.000,00	100

Realisasi anggaran per kegiatan Tahun 2021, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 15
Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2021

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi dalam rangka penyusunan Nasihat dan Pertimbangan kepada Presiden	2.352.749.000,00	1.766.159.486,00	75.07
Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden	29.257.274.000,00	28.755.361.304,00	98,28
Jumlah	31.610.023.000,00	30.521.520.790,00	96.56

Realisasi anggaran belanja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden digunakan untuk membiayai:

- a. Belanja Pegawai, yang meliputi belanja gaji dan tunjangan Pejabat Negara, belanja uang makan PNS dan belanja uang lembur.
- b. Belanja Barang, yang meliputi belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan.
- c. Belanja Modal, yang meliputi belanja modal peralatan dan mesin, belanja penambahan nilai gedung dan bangunan, dan belanja modal lainnya.

Perbandingan realisasi anggaran Tahun 2020 dengan Tahun 2021 per jenis kegiatan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 16
Perbandingan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Tahun 2020 dan Tahun 2021

KEGIATAN	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi dalam rangka penyusunan Nasihat dan Pertimbangan kepada Presiden	756.337.000,00	738.610.221,00	97,66	2.352.749.000,00	1.766.159.486,00	75,07
Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden	28.346.770.000,00	27.523.584.967,00	97,10	29.257.274.000,00	28.755.361.304,00	98,28
Jumlah	29.103.107.000,00	28.262.195.188,00	97.11	31.610.023.000,00	30.521.520.790,00	96.56

Pagu Alokasi dan Realisasi anggaran per Indikator Kinerja pada kegiatan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 17
Pagu Alokasi dan Realisasi anggaran per Indikator Kinerja pada kegiatan
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2021

KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden dalam melaksanakan tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	2.352.749.000,00	1.766.159.486,00	75,07

KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Persentase penyelesaian layanan perumusan nasihat dan pertimbangan Dewan Pertimbangan Presiden	1.523.130.000,00	1.062.336.722,00	69,75
2	Persentase penyediaan data dan informasi serta analisis yang dibutuhkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden	529.923.000,00	440.750.890,00	83,17
3	Jumlah rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu	63.440.000,00	63.440.000,00	100
4	Persentase pelaksanaan layanan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden	120.372.000,00	107.460.000,00	89,27
5	Persentase pelaksanaan pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang dibutuhkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan sinergitas TIK di lingkungan Lembaga Kepresidenan	115.884.000,00	92.171.874,00	79,54
6	Jumlah dokumen rencana kerja dan Laporan Kinerja Biro Data dan Informasi yang disusun.	0	0	0

KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden		29.257.274.000,00	28.755.361.304,00	98,28
1	Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan	229.542.000,00	79.326.300,00	34,56
2	Persentase Kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan	0	0	0
3	Jumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan	16.290.000,00	15.870.500,00	97,42
4	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan	0	0	0
5	Jumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan sesuai standar	0	0	0
6	Jumlah dokumen penyelenggaraan Urusan keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan	16.200.000,00	9.600.000,00	59,26
7	Jumlah dokumen administrasi sarana dan prasarana sesuai ketentuan	0	0	0
8	Persentase penyediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan	28.995.242.000,00	28.650.564.504,00	97,28

KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
9	Persentase penerapan <i>e-procurement</i> dalam pengadaan barang dan jasa	0	0	0
10	Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan tahunan Biro Umum yang disusun	0	0	0

2. Analisis Penyerapan Anggaran Selama Tahun 2021

Selama tahun 2021, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah melaksanakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya penghematan dan perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Anggaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden pada DIPA awal sebesar **Rp33.932.177.000,00**, dan melaksanakan penghematan anggaran sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga anggaran setelah revisi menjadi **Rp31.610.023.000,00**. Penghematan yang telah dilaksanakan yaitu,

- a. Penghematan Tahap I dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional penanganan Pandemi Covid 19, sebesar **Rp66.522.000,00**;
- b. Penghematan Tahap 2 dalam rangka pendanaan penanganan Pandemi Covid 19 dan dampak yang ditimbulkan, sebesar **Rp186.753.000,00**;
- c. Penghematan Tahap 3 dalam rangka pendanaan penanganan kesehatan dan perlindungan kepada masyarakat sebagai dampak pelaksanaan PPKM darurat sebesar **Rp186.753.000,00**.

Realisasi penyerapan anggaran tahun 2021 dari pagu sebesar **Rp30.521.520.790,00** yaitu sebesar **Rp31.610.023.000,00** atau sebesar

96,56%. Jika Dibandingkan dengan tahun **2020** dengan realisasi anggaran belanja sebesar **97,11%**, maka dapat diketahui bahwa realisasi anggaran tahun 2021 mengalami penurunan sebesar **0,55%**, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian kegiatan yang dilaksanakan akibat dampak pandemi COVID-19 yang melanda sejak tahun 2020.

Pada masa pandemi COVID-19 di tahun 2021, rencana penarikan dana atas belanja negara memerlukan pemantauan yang lebih ekstra dari pengelola kas. Hal ini dikarenakan di masa pandemi ini kegiatan belanja instansi menjadi lebih sulit untuk diproyeksikan, salah satunya disebabkan kondisi ekonomi yang masih sangat bergantung pada kebijakan pemerintah seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

F. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2021 Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah melakukan efisiensi penggunaan sumber daya antara lain sebagai berikut

1. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mengalami kekurangan jumlah SDM. Jika mengacu pada rancangan kebutuhan peta jabatan fungsional yang disampaikan sebelumnya. Namun demikian, kekurangan jumlah SDM tersebut tidak mempengaruhi pencapaian target kinerja secara keseluruhan yaitu sebesar 100%. Hal ini merupakan efisiensi dari sisi SDM.

2. Efisiensi Anggaran

Anggaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden untuk Tahun 2021 pada DIPA awal sebesar **Rp33.932.177.000,00**, dan mengalami penghematan anggaran sebesar **Rp2.322.154.000,00**, sehingga anggaran setelah revisi menjadi **Rp31.610.023.000,00**. Penurunan anggaran tersebut tidak mengurangi target capaian *output* maupun capaian *outcome*. Selama tahun 2021 target *output/outcome* tetap tercapai 100%.

3. Sarana Prasarana

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden juga melakukan efisiensi mesin printer dan fotocopy secara bersama yang terhubung dengan jaringan internet lokal. Selain itu juga dilakukan efisiensi dari proses bisnis pada Tata Usaha (TU) Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dengan implementasi aplikasi SPDE-Open dalam proses bekerja yang berdampak pada penghematan penggunaan ATK, mempercepat distribusi persuratan, mempermudah tanda tangan pejabat secara digital (mobile) dan menghilangkan fungsi caraka karena aplikasi SPDE-Open mencakup seluruh Satker di lingkungan Lembaga Kepresidenan.

G. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi kinerja yang digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, serta peningkatan kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berupa tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.

Tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2020-2021 disajikan melalui tabel berikut.

Tabel 18
Tindak Lanjut atas Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020-2021

Rekomendasi	Tindak Lanjut
Indikator Kinerja Utama Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden yang tertuang dalam perjanjian kinerja agar dirumuskan secara spesifik dalam sasaran kerja pegawai.	Indikator Kinerja Utama Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden dituangkan dalam 10 jenis layanan dengan 25 butir pertanyaan dalam kuisisioner tingkat kepuasan yang diturunkan ke dalam Perjanjian Kinerja tingkat Eselon II.
Pengumpulan dan penyusunan data capaian monitoring Rencana Aksi agar dicatat dengan otentik secara	Pengumpulan dan penyusunan data capaian monitoring Rencana Aksi 2021 telah dilakukan pencatatan dicatat

bulanan/triwulanan.	secara otentik setiap bulan.
<p>Laporan kinerja agar menyajikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi sumber daya manusia dan penggunaan sarana dan prasarana • Informasi kinerja lainnya terkait dengan penghargaan atau informasi program debirokratisasi/deregulasi/digitalisasi/sinergi. 	<p>Laporan kinerja Biro Umum Tahun 2021 telah menyajikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi sumber daya manusia dan penggunaan sarana dan prasarana • Informasi kinerja lainnya terkait dengan penghargaan atau informasi program debirokratisasi/deregulasi/digitalisasi/sinergi.

H. Informasi Kinerja Lainnya

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mendukung kebijakan Kementerian Sekretariat Negara sebagai kementerian yang lebih progresif dan terus berinovasi untuk membangun institusi menuju *smart government*. Dalam rangka menuju *smart government institution*, pada tahun 2021 Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah melakukan beberapa kegiatan sebagai capaian kinerja lain yang dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, yaitu,

1. Penghargaan

Selama tahun 2021 Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menerima Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: HM.05/280/2021 atas peran sertanya dalam Penyelamatan dan Pelestarian Arsip yang Bernilai Guna Pertanggungjawaban Nasional bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara tanggal 10 November 2021.

2. Inovasi

Selama tahun 2021, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden melakukan beberapa inovasi. Inovasi yang dilakukan sebagai peran aktif Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam melaksanakan arahan

Menteri Sekretaris Negara untuk melakukan inovasi di lingkungan kerja masing-masing. Adapun dua inovasi yang dilakukan yaitu,

- a. **Data Lab** yaitu *platform* terintegrasi untuk data *storage*, *dataset creation*, data processing, dan data *visualization*. *Platform* ini dikembangkan oleh pejabat dan pegawai di Lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Tujuan dari *platform* ini adalah tersedianya koleksi dataset yang dapat diolah dan divisualisasikan kapanpun dan oleh siapapun dilingkup Setwantimpres; dan
- b. **News Flows** yaitu *platform webbased* untuk memudahkan monitoring media dan berita strategis sehingga dapat mudah dilihat dan tersimpan terpusat secara lengkap yang dapat disajikan secara cepat dan tepat waktu. *Platform* ini dikembangkan pejabat dan pegawai di Lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

3. Penyederhanaan Birokrasi

Sebagai langkah strategis dan konkret penyederhanaan birokrasi pada tahun 2021 Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden ikut terlibat dalam serangkaian rapat koordinasi terkait penyusunan kebutuhan struktur jabatan fungsional dengan berbagai pemangku kepentingan yaitu Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB).

4. Aplikasi *Data Mining* untuk pengelolaan Data Digital

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mulai akhir tahun 2020 telah menyediakan aplikasi *data mining* yang dapat diakses oleh pejabat dan pegawai terkait melalui jaringan internet (*server* lokal). Penggunaan aplikasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemberian dukungan data dan informasi kepada Anggota Wantimpres dengan kemudahan dalam aksesibilitas data yang terstandarisasi dan cepat dalam penyampaian. Namun dalam implementasi masih memerlukan optimalisasi lebih lanjut.

5. Aplikasi Monitoring Beban Kerja

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden selama tahun 2021 menggunakan aplikasi *trello* dan *googledocs spreadsheet* untuk melakukan monitoring beban kerja para pejabat dan pegawai, baik untuk

penugasan substansi, pembuatan notula, pembuatan konten berita pada *website* dan media sosial Wantimpres, maupun penugasan administrasi.

6. Sinergi Pengelolaan TIK Setwantimpres

Selama tahun 2021, terkait dengan pengelolaan TIK di Lingkungan Setwantimpres, Biro Data dan Informasi telah melakukan beberapa kegiatan yaitu pembentukan Tim Gabungan Pengelola TIK (Wantimpres, Setneg dan Setpres), peremajaan kabel jaringan dan *switch*, pinjam pakai alat *Bandwidth Controller Management*; Audit Keamanan oleh BSSN; serta melaksanakan koordinasi dukungan teknis dengan pengelola TIK dengan Biro Infodatek Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Biro Pers Media Sekretariat Presiden, serta Deputi III Kantor Staf Presiden.

7. Sinergi Pengelolaan Informasi Publik

Selama tahun 2021, terkait dengan pengelolaan publik dan kehumasan, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tergabung sebagai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pelaksana di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Kegiatan PPID yang dilaksanakan di lingkungan Setwantimpres meliputi, berkoordinasi dengan PPID Utama terkait dengan pengelolaan informasi dan dokumentasi, mengkoordinasikan pengumpulan informasi publik, mengkoordinasikan pengklasifikasian seluruh informasi publik dan menyimpan, mendokumentasikan serta mengarsipkan informasi publik. Pelaksana PPID di lingkungan Setwantimpres secara aktif mengikuti pertemuan dengan PPID Utama Kementerian Sekretariat Negara.

8. Sinergi pengelolaan Arsip

Selama Tahun 2021 Setwantimpres bekerja sama dengan ANRI telah melaksanakan kegiatan Penyusutan Arsip sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Negara Periode 2014-2019. Kegiatan penyusutan Arsip meliputi pemusnahan Arsip Keuangan Setwantimpres Tahun 2007 sampai dengan 2009 dan Arsip Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2007 s.d. 2019. Kegiatan pemusnahan arsip ini dilaksanakan mengingat sejak Setwantimpres berdiri pada tahun

2007, telah banyak arsip yang tercipta diantaranya arsip keuangan dan Arsip Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden serta sifat sensitifitas arsip tersebut, sehingga prioritas penyusutan arsip dilaksanakan terhadap kedua jenis arsip dimaksud.

Pelaksanaan Pemusnahan arsip Keuangan Setwantimpres Tahun 2007 sampai dengan 2009 dan Penyerahan Arsip Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2007 s.d. 2019 dilaksanakan di kantor Dewan Pertimbangan Presiden sesuai protokol kesehatan Covid-19 pada tanggal 10 November 2021 disertai penandatanganan Berita Acara Pemusnahan Arsip nomor 02/Ses.Wantimpres/KA.01.01/11/2021 dan Berita Acara Serah Terima Arsip Statis Dari Dewan Pertimbangan Presiden Kepada Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 01/Wantimpres/KA.01.02/11/2021 dan nomor KN.00.04/353/2021.

9. Debirokratisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada Juni 2021 sebagai gambaran pelaksanaan PMPRB di lingkungan Sekretariat Dewan Presiden tahun 2020 – 2021 dan langkah perbaikan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mengalami peningkatan nilai dari **35,26** menjadi **35,82**.

I. Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun Sebelumnya

Tindak lanjut atas langkah yang perlu diambil oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden di tahun 2021 seperti yang tercantum dalam LKj Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020, disajikan melalui tabel berikut.

Tabel 19
Tindak Lanjut atas Rekomendasi
LKj Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020

Rekomendasi	Tindak lanjut
<p>Tindak lanjut penanganan pandemi COVID-19 antara lain penyediaan anggaran penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp1.130.035.000,00 yang antara lain dialokasikan untuk kegiatan pengadaan barang kesehatan penanggulangan COVID-19, pengadaan multivitamin penambah daya tahan tubuh, pengadaan peralatan penanggulangan COVID-19, dan penyediaan layanan Rapid Test, Serology Antibody SARS-CV, dan Vaksinasi COVID-19</p>	<p>Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden selama tahun 2021 telah menyediakan anggaran Pandemi Covid-19 sebesar sebesar Rp898.371.000,00.</p> <p>Realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 pada TA 2021 adalah sebesar Rp876.402.418,00 atau 97,55% dari anggaran belanja sebesar Rp898.371.000,00. Rincian Anggaran. Anggaran pandemi Covid-19 selama tahun 2021 digunakan antara lain untuk,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja Barang Operasional yaitu vitamin; b. Belanja Barang Persediaan seperti masker, hand sanitizer dan platik GeNose; dan c. Belanja Jasa seperti penyemprotan disinfektan, Tes Swab antigen dan PCR.
<p>Meningkatkan layanan data bagi Dewan Pertimbangan Presiden berupa langganan media monitoring (IMM) dan langganan data (CEIC), serta pengumpulan data dan informasi bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pertahanan dan keamanan.</p>	<p>Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah meningkatkan pelayanan data bagi Dewan Pertimbangan Presiden melalui pengadaan langganan media monitoring (IMM) dan langganan data (CEIC).</p>

Rekomendasi	Tindak lanjut
<p>Melaksanakan peningkatan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kualitas pegawai yang ada saat ini, dengan cara mendorong pegawainya untuk berperan secara aktif dalam kegiatan pelatihan yang diadakan di dalam maupun di luar Satuan Kerja Kementerian Sekretariat Negara.</p>	<p>Sesuai dengan PMK Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSPM, pejabat Pengelolaan Keuangan APBN di Lingkungan Setwantimpres telah melaksanakan kegiatan Penyegaran/Refreshment Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).</p> <p>Sebagai Bekal bagi SDM di bidang kearsipan, Arsiparis Terampil pada Biro Umum Setwantimpres telah melaksanakan Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Terampil, yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan ANRI. Diklat ini mempelajari tentang penyelenggaraan kearsipan, termasuk pengelolaan arsip baik arsip dinamis maupun arsip statis, mulai dari tahap penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan sampai pada fase pengelolaan statisnya.</p> <p>Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden juga telah melaksanakan Pendidikan dan pelatihan teknis antara lain,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelatihan “Tingkatkan Produktivitas dengan Microsoft Excell”; b. AI & Big Data Enable National Digital Economy Strategy; c. Bimbingan Teknis Diklat Online:

Rekomendasi	Tindak lanjut
	<p>Sukses Publikasi Jurnal Ilmiah;</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Setneg MOOCs Batch I; e. Setneg MOOCs Batch IV; f. Pelatihan Basic Leadership; g. Diklat Tata Naskah Dinas; h. Bimbingan Teknis Penulisan dan Penerbitan Buku Bagi Pejabat Fungsional; i. Social Leadership for Senior Managers; j. Merancang Policy Brief yang Efektif.
<p>Tindak lanjut perubahan jabatan dari Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional, diantaranya penyesuaian Analisis Beban Kerja dan Sasaran Kinerja Pegawai, berbasis angka kredit.</p>	<p>Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah melaksanakan atas tindak lanjut perubahan jabatan dari Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional, antara lain,</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan <i>Objective Key Results</i> (OKR) untuk menciptakan nilai tambah bagi unit kerja melalui terobosan dan inovasi untuk mendukung pencapaian tujuan, daya saing, serta keberlanjutan; dan b. Penyesuaian Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada jabatan yang baru melalui Aplikasi E-Anjab & E-ABK.
<p>Melaksanakan monitoring pelaksanaan Kinerja Program dan Anggaran dalam upaya pemantauan dan evaluasi, serta menjawab dinamika yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.</p>	<p>Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran Tahun 2021.</p>

Rekomendasi	Tindak lanjut
<p>Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang telah tersedia dan mendorong inovasi dalam upaya peningkatan koordinasi antara Sekretariat dengan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.</p>	<p>Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mendorong pejabat/pegawai Melaksanakan Inovasi yaitu,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Data lab <ul style="list-style-type: none"> Membangun platform pengelolaan data yang terintegrasi dalam satu ekosistem, mulai dari penyimpanan data, pembuatan dataset, pengolahan data, hingga penyajian/visualisasi data; dan b. News Flows <ul style="list-style-type: none"> Membangun Aplikasi <i>NewsFlow</i> untuk memenuhi kebutuhan akan ketersediaan informasi berupa isu strategis dan berita secara lengkap dan tepat waktu.
<p>Melaksanakan evaluasi terhadap tenaga non Pegawai Negeri Sipil (Pegawai Tidak Tetap) secara periodik untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan serta memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kelebihan yang dimiliki. Evaluasi yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.</p>	<p>Dalam pelaksanaan pelayanan yang bersifat teknis, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden merekrut Pegawai Tidak Tetap (PTT) tersebut bertugas sebagai Satpam, Pramubhakti, dan Pengemudi. Untuk menjaga kualitas pelayanan yang diberikan, Biro Umum Setwantimpres melaksanakan Evaluasi terhadap hasil pekerjaan PTT yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Aspek yg dinilai meliputi,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Disiplin yang dilihat dari presensi; b. Kerjasama yang dilihat dari kemampuan untuk melakukan pekerjaan yg melibatkan pihak lain; c. Integritas yang dilihat dr kejujuran dalam memegang kerahasiaan

Rekomendasi	Tindak lanjut
	<p>dokumen kedinasan; dan,</p> <p>d. Komitmen yang dilihat dari penyelesaian pekerjaan yg di bebaskan;</p> <p>e. Evaluasi terhadap pekerjaan PTT yang dilaksanakan juga menjadi dokumen penting dalam bahan pengambilan keputusan dan kebijakan akan dimasa yang akan datang.</p>
<p>Meningkatkan kualitas layanan kehumasan melalui website dan media sosial.</p>	<p>Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik informasi melalui kegiatan berupa penanganan pengaduan masyarakat dan pengelolaan <i>website</i>, media sosial dan kanal <i>Youtube</i>.</p>

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam melaksanakan tugasnya memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Capaian Indikator Kinerja berupa **tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden pada tahun 2021 adalah 100%**, dari target **86%** tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden terealisasi sebesar **92,20%**.

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 merupakan ukuran keberhasilan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka mendukung sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis. Dengan capaian Indikator Kinerja dimaksud, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berhasil memenuhi capaian sasaran strategis “Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden”

Kinerja anggaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2021 dari pagu setelah penghematan sebesar **Rp31.610.023.000,00** penyerapan anggaran dalam rangka pencapaian Sasaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yaitu sebesar **Rp30.521.520.790,00** atau sebesar **96,56%**

B. Langkah Ke depan

Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden di tahun yang akan datang, hal-hal yang akan dilakukan antara lain:

1. Melaksanakan penyesuaian atas perubahan SOTK yang mempengaruhi peta bisnis proses di lingkungan Setwantimpres khususnya terkait pekerjaan tata usaha perjalanan dinas melalui penerbitan Surat Perintah atau pengesuaian kembali SOTK Setwantimpres.
2. Mendorong pejabat fungsional di lingkungan Setwantimpres untuk melakukan pengembangan kompetensi sesuai kualifikasi atau jenjang pendidikan yang menjadi syarat wajib dimiliki oleh pejabat fungsional dimaksud.
3. Melaksanakan penyesuaian aturan-aturan teknis terkait SOTK untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja.
4. Mengalokasikan anggaran guna mengantisipasi penanganan pandemi Covid-19 selama tahun 2022
5. Meningkatkan kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi
6. Meningkatkan pemanfaatan TIK serta kompetensi pegawai dalam penguasaan TIK dimaksud untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi guna peningkatan kinerja pejabat dan pegawai yang lebih efektif dan efisien
7. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan untuk memperkuat kemampuan dalam memanfaatkan dan mengelola anggaran secara terencana, tepat sasaran dan tepat waktu.
8. Meningkatkan sinergi Biro Data dan Informasi dengan Biro Umum Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden untuk optimalisasi capaian kolektif organisasi antara lain SAKIB, PMPRB, Inovasi dan Layanan ICT.



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Agus Widodo
jabatan : Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Wiranto
jabatan : Ketua Dewan Pertimbangan Presiden

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Wiranto

Jakarta, Januari 2021
Pihak Pertama,

Agus Widodo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	86%

Program

Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden

Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 2.454.416.000,00

Rp 31.477.761.000,00

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden



Wiranto

Jakarta, Januari 2021

Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden,



Agus Widodo



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : M. Arfan Sahib S.K., S.E., M.F.M.
jabatan : Kepala Biro Data dan Informasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Agus Widodo
jabatan : Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



AGUS WIDODO

Jakarta, Januari 2021
Pihak Pertama,



M. ARFAN SAHIB S.K.

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIRO DATA DAN INFORMASI

No. (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden dalam melaksanakan tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	1. Persentase penyelesaian layanan perumusan nasihat dan pertimbangan Dewan Pertimbangan Presiden 2. Persentase penyediaan data dan informasi serta analisis yang dibutuhkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 3. Jumlah rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu 4. Persentase pelaksanaan layanan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden 5. Persentase pelaksanaan pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang dibutuhkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan Sinergitas TIK di Lingkungan Lembaga Kepresidenan 6. Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan tahunan Biro Data dan Informasi yang disusun	100% 100% 2 dokumen 100% 100% 2 dokumen

Program

Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden

Kegiatan

Pengelolaan data dan Penyajian Informasi dalam rangka penyusunan Nasihat dan Pertimbangan kepada Presiden

Anggaran

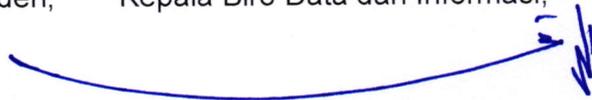
Rp2.454.416.000

Jakarta, Januari 2021

Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden,

Kepala Biro Data dan Informasi,


 AGUS WIDODO


 M. ARFAN SAHIB S.K.



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : A.M. Adiyarto Sumardjono
jabatan : Kepala Biro Umum

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Agus Widodo
jabatan : Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Agus Widodo

Jakarta, Januari 2021
Pihak Pertama,


A.M. Adiyarto Sumardjono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIRO UMUM**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya dukungan pelayanan keprotokolan dan persidangan serta pelayanan administrasi umum di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.	1	Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan	100%
		2	Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan Persidangan	100%
		3	Jumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan	2 dokumen
		4	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan	10 dokumen
		5	Jumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan sesuai standar	1 dokumen
		6	Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan	9 dokumen
		7	Jumlah dokumen administrasi sarana dan prasarana sesuai ketentuan	1 dokumen
		8	Persentase penyediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan	100%
		9	Persentase penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa	100%
		10	Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan tahunan Biro Umum yang disusun	2 dokumen

Kegiatan

Kegiatan Penyelenggaraan
Dukungan Manajemen Dewan
Pertimbangan Presiden

Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden,


Agus Widodo

Anggaran

Rp 31.477.761.000,00

Jakarta, Januari 2021

Kepala Biro Umum,


A.M. Adiyarto Sumardjono

**Formulir Pengukuran Kinerja
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2021**

Unit Organisasi Eselon I : Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
Tahun Anggaran : 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Rencana (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	86	92,20	100	31.610.023.000,00	30.521.520.790,00	96,56